

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.¹

David J. Lawless dalam Gibson, Inancevich dan Donnelly mengatakan bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan yaitu:

1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

¹ Gibson JL JM Inancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001), hal 120.

2. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektifitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi.

3. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok.

Melalui sinergritas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah tercapai.²

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.³

Abdulrahmat Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.⁴

² <http://al-bantany-112.blogspot.com,2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html>

³ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002)

⁴ Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003), hal. 92

Menurut Mulyasa Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota.⁵

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.⁶

B. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

⁵ Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hal 82

⁶ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), hal 15

Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.⁷

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan

⁷ Sondang P. Siagian, *Op. cit*, hal 77

komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.⁸

Duncan yang di kutip oleh Steers mengemukakan tentang teori pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah Efektivitas Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu di Tinjau Dari Ekonomi Islam

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.⁹

a. Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi)

Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas

⁸ Steers, M Richard. *Efektivitas Organisasi*. (Jakarta: Erlangga 1985) hal. 53

⁹ M. Richard steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Air Langga, 1999) hal. 159

organisasi. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi.

Tercapainya kemajuan di dalam teknologi dapat memperkenalkan cara-cara yang lebih produktif dengan menggunakan sarana-sarana baru akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Pemanfaatan kedua hal tersebut secara baik, yakni struktur dan teknologi akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya.

b. Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan)

Karakteristik lingkungan ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

c. Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja)

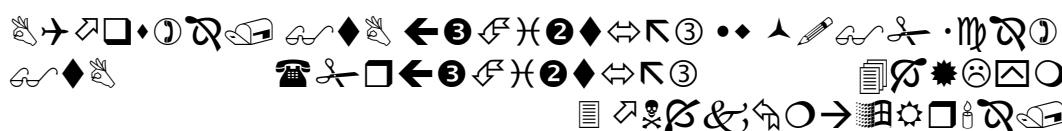
Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja. Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektivitas mustahil akan tercapai.

d. Kebijakan dan praktek manajemen

Kebijakan dan praktek manajemen merupakan mekanisme yang meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam hal ini, manajer sangat penting untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan secara profesional untuk mencapai tujuan.

D. Program Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan yang di istilahkan dengan kata “empowerment” adalah sebuah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi itu menjadi tindakan nyata. Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila individu tersebut dan sadar mau berubah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Ar Ra’d ayat 11



Artinya : “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”. (QS. Ar Rad:11)¹⁰

Pemberdayaan bisa diartikan sebagai perubahan kepada arah yang lebih baik, dari yang tidak berdaya menjadi yang berdaya. Pemberdayaan terkait dengan upaya meningkatkan hidup keningkat yang lebih baik. Pemberdayaan

¹⁰ Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung PT Syaamil Cipta Media) hal. 250

adalah meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, tentunya dalam menentukan tindakan kearah yang lebih baik lagi. Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.¹¹

Narayan menyatakan ada tiga dimensi pokok kerangka pemberdayaan yaitu:

1. Inti, investasi untuk meningkatkan asset dan kemampuan masyarakat miskin, baik sebagai individu maupun secara kolektif. Arahnya adalah kemampuan memecahkan masalah secara swadaya dan peningkatan daya tawar dalam hubungan kelembagaan.
2. Penunjang, reformasi kelembagaan pemerintahan menuju *good governance* dan akuntabilitas public baik akibat tuntutan masyarakat maupun karena keharusan penyesuaian dengan pergeseran paradigma pembangun.
3. Mekanisme, merubah tata hubungan, terutama hubungan kekuasaan melalui proses dialogis/interaktif menuju tata hubungan berdasarkan kesetaraan, keadilan dan kemartabatan¹²

Menurut Sumodiningrat Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan

¹¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 77

¹² Narayan, *Empowerment and poverty Reduction: A Source Book*, (World Bank, 2002)

sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa.¹³

Berdasarkan teori diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat menunjukkan jati mereka, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi social, agama dan budaya.

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah satu bentuk program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa atau kelurahan guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Dana bantuan dimaksud diberi nama Dana Usaha Desa/Kelurahan. Pemanfaatan Dana Usaha Desa/Kelurahan harus memperhatikan potensi sumber daya alam desa/kelurahan serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan salah satu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah sesuai agenda utama Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propernas), serta dalam

¹³ Sumodiningrat, *Pemberdayaan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Bina Rena Parawira 1997).

keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau.

Program Pemberdayaan Desa (PPD) lebih diarahkan untuk menubuhkan rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, tidak saja dalam hal pengendalian dan pembinaan tetapi juga dalam hal pembiayaan program. Komitmen dari DPRD dan Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pemberian dukungan dan pembiayaan. Program Pemberdayaan Desa (PPD) selalu diarahkan pada penciptaan kondisi dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk melakukan pilihan-pilihan secara bebas dan mandiri sesuai dengan potensi dan karakteristik yang mereka miliki.

Visi Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Riau yang sejahtera dan mandiri sesuai dengan Visi Riau 2022, adapun Misi PPD adalah untuk mempercepat penanggulangan masalah kemiskinan, kebodohan dan infrastuktur (K2I) bagi masyarakat Riau. Pengembangan konsep Program Pemberdayaan Desa (PPD) juga diarahkan kepada penyelenggara pemerintah yang baik. Seluruh kegiatan dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD) pada hakekatnya memiliki 3 dimensi, yaitu 1) memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan kebutuhannya sendiri, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab. 2) menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam

pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri, serta 3) menyediakan modal usaha desa untuk mendanai kegiatan usaha ekonomi masyarakat.

Tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan menuju kemandirian Desa. Sasaran utama penerima Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah Desa/Kelurahan yang memiliki relatif lebih banyak penduduk miskin sebagai lokasi sasaran program, dan berpihak pada masyarakat miskin yang kekurangan modal usaha.

Program Pemberdayaan Desa menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui:

1. Perluasan kesempatan dan peluang bagi orang miskin dalam kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk:
 - a. Penciptaan iklim pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada masyarakat miskin.
 - b. Penciptaan lapangan kerja
 - c. Penyediaan bantuan permodalan yang berpihak pada masyarakat miskin.
 - d. Penguatan peran aparat pemerintah desa/kelurahan.

2. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk:
 - a. Penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan.
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan desa/kelurahan.
 - c. Pembangunan desa/kelurahan secara terencana dan berkelanjutan.
 - d. Penguatan kapasitas kelompok dan anggota usaha kecil dan menengah.¹⁴

Untuk mendukung tercapainya tujuan program maka dalam pelaksanaannya harus sejalan dengan prinsip dasar Program Pemberdayaan Desa (PPD) yaitu transparan, memihak kepada masyarakat, akuntabilitas, termasuk dalam hal usulan, pemilihan pengelola, sistem pengelolaan serta penyaluran dana. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Dana Usaha Desa/kelurahan harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat setempat dengan mudah dan terbuka, dan disebarluaskan melalui papan informasi.

E. Program Ekonomi Kerakyatan

Istilah ekonomi kerakyatan sesungguhnya bukan merupakan istilah yang baru. Istilah ini sudah digunakan oleh para pendiri negara ini jauh sebelum Indonesia memproklamkan kemerdekaan. Ungkapan lain dari ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis atau demokrasi ekonomi. Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, maka ekonomi kerakyatan adalah

¹⁴ Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa, *Panduan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan UED-SP Program Pemberdayaan Desa(PPD)*, (Pekanbaru: 2009), hal 2

suatu sistem perekonomian yang didalamnya terselenggara berbagai kegiatan ekonomi dengan melihat partisipasi semua warga masyarakat.

Menurut Mubyarto ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil¹⁵. Sedangkan menurut zulkarnain, ekonomi kerakyatan adalah suatu system ekonomi yang dianut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan demokrasi ekonomi, dan keberpihakan kepada ekonomi rakyat.¹⁶

Program ekonomi kerakyatan adalah program pemberdayaan dimana masyarakat diberi peluang untuk memanfaatkan modal yang disediakan. Pemberdayaan rakyat dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar rakyat banyak (masyarakat awam) mendapat kesempatan berusaha secara wajar, sehingga dari usahanya itu mereka mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik barang atau jasa yang dapat memberi pendapatan (income) yang wajar bagi kehidupan mereka.

Menurut BAPPED Provinsi Riau, pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau pada dasarnya dilaksanakan dengan bertitik tolak pada permasalahan utama yang dihadapi dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu kesulitan memperoleh modal usaha/modal kerja.¹⁷ Oleh karena itu, orientasi pertama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi kerakyatan sejak tahun 2001 adalah bagaimana

¹⁵ Mubyarto, *Reformasi System Ekonomi, (Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan)*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999) hal. 81.

¹⁶ Zulkarnaini, *Membangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003) hal. 98.

¹⁷ Balai pusat penyuluhan. Diktat Panduan Pengembangan masyarakat. (Balai Pusat Penyuluhan Provinsi riau, Pekanbaru 2004)

menyediakan dana bagi masyarakat untuk memperkuat permodalan melalui kredit pinjaman modal.

Selanjutnya tujuan pinjaman modal PEK ini adalah : 1). Menyediakan dana bagi pengembangan usaha masyarakat, 2). Membuka peluang masyarakat mendirikan usaha; 3). Meningkatkan kemampuan dan wawasan kewirausahaan masyarakat dan aparat; 4). Mendidik masyarakat mengelola usaha secara professional; 5). Meningkatkan produksi kebutuhan pokok masyarakat dan memperluas jangkauan masyarakat; 6). Mempercepat pemulihan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sektor riil masyarakat menengah kebawah. Sasaran pelaksanaan PEK adalah bergerakinya sektor usaha masyarakat sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.¹⁸

Berdasarkan tujuan pinjaman modal PEK diatas diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan tercapai pengurangan jumlah angka masyarakat miskin yang ada di Riau secara bertahap.

F. Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)

Pada tingkat perkembangan ekonomi masyarakat di pedesaan saat sekarang ini sangat diperlukan adanya lembaga perkreditan yang dapat memenuhi dan melayani kebutuhan permodalan masyarakat dipelosok pedesaan secara nyata dan mampu menyesuaikan diri dengan tingkat dan kemampuan masyarakat desa pada umumnya.

¹⁸ *Ibid*

Salah satu tujuan dari penyaluran dana usaha desa adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan dalam rangka mengembangkan usaha. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam atau yang lebih dikenal dengan istilah UED-SP adalah salah satu dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang direncanakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberian dana usaha desa yang kemudian dimanfaatkan untuk bantuan modal usaha yang diberikan pada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD).

UED-SP adalah lembaga keuangan mikro yang dibentuk oleh desa/kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Desa dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat. UED-SP adalah kegiatan usaha ekonomi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/ kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/ kelurahan.

UED-SP merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang bergerak dibidang perkreditan untuk membantu masyarakat desa dalam mengelola usaha ekonomi desa. Kehadiran UED-SP ditengah masyarakat desa diharapkan dapat membantu menyediakan modal usaha bagi para pengelola usaha-usaha ekonomis produktif.

G. Usaha dalam Pandangan Ekonomi Islam

Didalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa usaha adalah kegiatan dengan mengarah tenaga, pikiran, dan pekerjaan untuk mencapai

sesuatu.¹⁹ Secara umum usaha diartikan sebagai sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dan rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.²⁰

Menurut Yusuf Qardhawi, usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerakan anggota tubuh maupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun orang lain.²¹ Jadi dilihat dari defenisi diatas jelas bahwa kita dituntut untuk berusaha dengan usaha apapun dalam konteks usaha yang halal untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan ini. Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, usaha kata lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produk dan penjualan barang-barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.²²

Banyak ayat Al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.²³ Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan berusaha kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang

¹⁹ M. Relona, *Kamus Istilah Ekonomi populer*, (Jakarta: Gorga Media, 2006) cet. Ke- 3

²⁰ Muslich, *Etika Bisnis Islam : Landasan Filosofis, Normatif, dan Subtansi Implementatif*, (Yogyakarta : Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004) hal. 46

²¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997) hal. 104

²² Muhammad Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjaja kusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hal. 15

²³ Husein syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta : Gema Insani, 2004) hal.62

yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.²⁴

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi islam yang bersifat pribadi dan sosial ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, sedangkan ekonomi yang bersifat social adalah membrantas kemiskinan masyarakat, pemberantas dan kemeralatan.²⁵ Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah SWT. Kewirausahaan, kerja keras, berani mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki oleh seseorang dalam kebutuhan hidupnya.

1) Prinsi-Prinsip Usaha Dalam Islam

Konsep usaha dalam islam adalah untuk mengambil yang halal dan yang baik (thayyib), halal cara memperoleh (melalui perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha, berlaku adil, dan menghindari keraguan), dan halal cara penggunaan (saling tolong-menolong dan menghindari resiko yang berlebihan).²⁶

a. Sama-sama ridha

Pengertian ini tidak hanya dalam makna sempit, suka sama suka melainkan mencakup pula pengertian bahwa tidak ada pihak yang

²⁴ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin : Antasari Perss 2011) hal. 29

²⁵ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau Graha UNRI Press, 2007) hal.6

²⁶ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : BUmi Askara, 2008), hal. 188

terzalimi dan keiklasan dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam perdagangan lebih jauh dari itu, harga yang ditetapkan harus melalui penilaian oleh masyarakat atau mekanisme pasar yang sesuai kaidah yang berlaku.

b. Adil

Adil sangat dipelukan dalam kegiatan perniagaan supaya tidak merugikan salah satu pihak atau bias mengeksploitasi orang lain. Berbuat adil akan dekat pada takwa sehingga akan terhindar dari hal-hal yang bias mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam al-Qur'an kata adil disebut berkali-kali. Artinya, Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk didalamnya adil ketika melakukan perniagaan.

c. Menghindari keraguan

Islam melarang dalam perniagaan melakukan penipuan, bahkan sekedar membawa kondisi kepada keraguan yang bisa menyesatkan (gharar). Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.²⁷

d. Menghindari resiko yang berlebihan

Bumi dan segala isinya merupakan karunia Allah yang harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, artinya pemamfaatannya harus dilakukan seefisien mungkin, tanpa harus berlebih-lebihan sehingga terhindar dari resiko yang tidak bias

²⁷ *Ibid*, hal 190

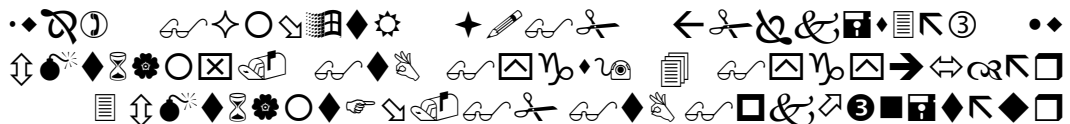
ditanggung manusia. Risiko itu pasti ada dalam semua usaha, tetapi risiko yang dimaksud adalah risiko yang masih berada dalam batas kewajaran. Pengambilan risiko yang melebihi kemampuan untuk menanggungnya sama seperti menghadapi ketidakpastian.

e. Usaha yang Halal dan Baik

Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal, memakan makanan yang halal dan menggunakan rizki secara halal. Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang, karena pada akhirnya dapat mebinasakan suatu bangsa.

f. Berusaha sesuai dengan batas kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira itu sesuai dengan perintah, karena kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya.²⁸ Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia, sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 286 :



Artinya : *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari*

²⁸ *Ibid*, hal. 67

kejahatan) yang dikerjakannya.” (QS. Al-Baqarah ayat 286)²⁹

2) Tujuan Usaha Dalam Islam

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Kebutuhan manusia dapat digolongkan kedalam tiga kategori, yaitu kategori *daruriyat* (primer), *bajiyat* (sekunder), dan kamaliyat (tersier-perlengkapan). Dalam terminologi islam “daruriyat” adalah kebutuhan secara mutlak tidak dapat dihindari, karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat elastic bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu fardhu’ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang.

b. Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan keluarga sejahtera. Islam mensyari’atkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing.³⁰

c. Usaha untuk memakmurkan bumi

Memakmurkan bumi adalah tujuan dari maqasidus syria’ah yang ditanamkan oleh Islam disinggung oleh Al-Qur’an serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah al-Imam Arraghib al-Asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan

²⁹Depertemen Agama RI, op. cit., hal 49

³⁰*Ibid.* hal 67

Allah hanya untuk tiga kepentingan. Kalau bukan untuk tiga kepentingan itu, maka ia tidak akan ada.

1. Memakmurkan bumi, sebagaimana tertera didalam Al-Qur'an surat Hud ayat 61: "Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) menjadikan kamu pemakmurnya". Maksudnya, manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia
2. Menyembah Allah SWT, sesuai dengan firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat 56 : "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku".
3. Khalifah Allah SWT, sesuai dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 129 : "Dan menjadikan kamu khalifah dibumi-Nya", maka Allah melihat bagaimana perbuatanmu".³¹

d. Usaha untuk kerja

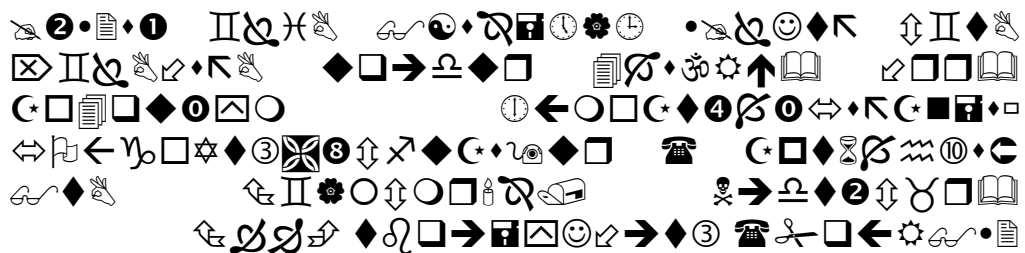
Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk bekerja dan berusaha meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya, atau oleh masyarakat, juga meskipun tidak satupun makhluk Allah SWT, termasuk hewan dapat dimanfaatkannya. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah salah satu cara mendekatkan diri kepadanya.

Suatu kegiatan usaha juga tidak saja berdampak negatif, tetapi juga akan membawa ekonomi atau akan mendatangkan kontribusi positif kearah pertumbuhan ekonomi. Pendirian suatu usaha sekecil apapun akan selalu menimbulkan dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang timbul adalah

³¹ *Ibid*, hal.111

besaranya tenaga kerja yang diserap oleh usaha yang akan didirikan dan besaranya kontribusi usaha terhadap penambahan pendapatan masyarakat sekitar.³²

Pada dasarnya ekonomi Islam itu sendiri berkaitan erat dengan kehidupan perekonomian manusia. Baik itu behubungan kesejahteraan manusia, sember daya, distribusi, tingkah laku manusia, apakah ia sebagai pedagang atau pengusaha, industri ataupun pemerintah. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal sesuai dengan amal atau kerja manusia itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S An-Nahl : 97) :



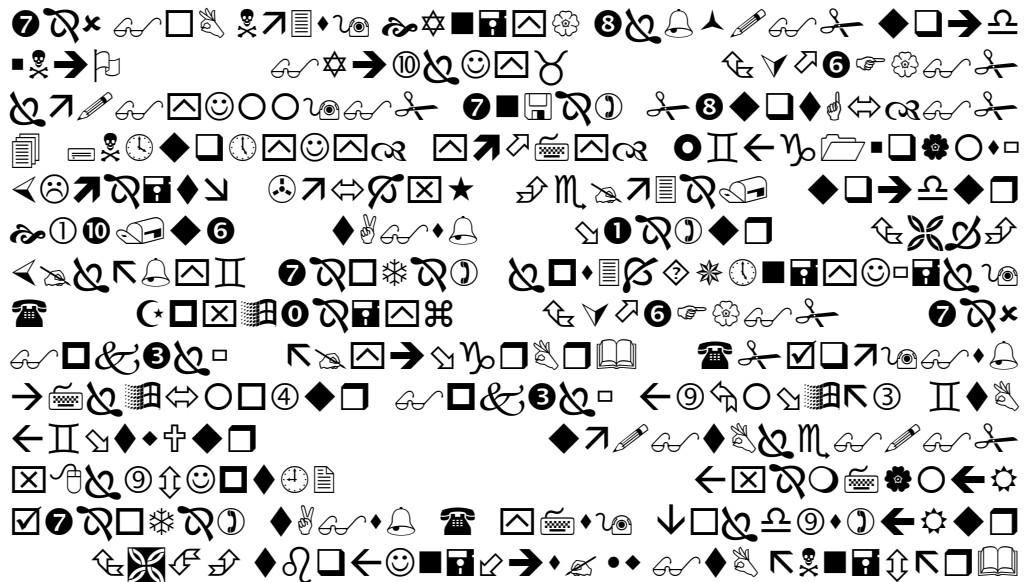
Artinya : *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan. (Q.S An-Nahl : 97)*³³

Sebagai khalifah dimuka bumi, manusia ditugaskan Allah SWT mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan umat. Namun ditegaskan-Nya bahwa tidak ada yang akan diperoleh manusia kecuali hasil

³² Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2009) hal. 161-163

³³ Depertemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 278

usahanya sendiri. Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 29-30 :



Artinya : *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al-Baqarah :29-30)³⁴*

Dari ayat diatas, dapat diuraikan pemahaman yang berisi manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini dan salah satunya peran manusia selaku khaliafah adalah mengelola segala yang ada dibumi dan dilangit.

³⁴ Depertemen Agama RI, *op. Cit.*, hal. 5